

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum. Sebagai organisasi sektor publik, misi utama pemerintah adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Praktik pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan utamanya. Tentunya setiap instansi mendapatkan dana dari APBD untuk mencapai tujuannya. Nantinya, anggaran juga harus mengakomodir pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya. Keuangan daerah harus dikelola dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan tentang keadilan, kesopanan, dan rasa hormat yang diterapkan dalam sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran.

Lembaga pemerintah melakukan berbagai upaya guna membiayai kegiatan pembangunan daerahnya, didukung dengan adanya sistem desentralisasi yang merupakan sistem dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri. Bentuk penerapan dari sistem desentralisasi yaitu dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-

undangan. Pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan yang mendasar dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Daerah yang berhasil melaksanakan otonomi daerah menunjukkan beberapa indikator, seperti kemampuan keuangan daerah dan pemanfaatan PAD. Pengukuran kinerja adalah alat manajemen berorientasi akuntabilitas yang digunakan untuk meningkatkan taraf dalam decision making dan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tindakan pemerintah. Hasil pengukuran tersebut dapat menunjukkan tingkat implementasi visi dan misi pemerintah saat ini. Pengukuran kinerja sektor publik sangat penting untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah sudah ekonomis, efektif dan efisien.

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran

kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi.

Pemerintah waajib melakukan pengelolaan keuangan yang transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta efektivitas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan sesuai tugas pokok dan fungsinya pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang baik maka dibutuhkan pertanggungjawaban masing-masing daerah atau penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh suatu daerah yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah (Hasanah, 2019).

Salah satu cara untuk mengukur kinerja lembaga sektor publik adalah dengan menggunakan pendekatan *value for money*. *Value for Money* adalah sebuah konsep yang mengatur organisasi sektor publik berdasarkan tiga faktor utama: ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2018). Pengadaan dan alokasi sumber daya yang hemat, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti meminimalkan penggunaan sumber daya dan memaksimalkan hasil, dan mencapai tujuan dengan efektif. Pendekatan *value for money* untuk pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan mekanisme manajemen pemerintahannya yang mengandalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan yang baik. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik, keseimbangan antara kekuasaan yang mereka miliki dan tanggung jawab (akuntabilitas) yang diberikan kepada mereka yang mereka layani.

Birokrat dapat lebih efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan perlindungan masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mencapai dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah akan menunjukkan kemampuan Daerah dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi rasio efektivitas yang dicapai maka kemampuan daerah dapat dikategorikan efektif, dan demikian pula sebaliknya. Efektivitas menunjukkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan Pemerintah Daerah yang dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Pendapatan Daerah itu sendiri adalah semua Penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi suatu daerah masing-masing. Komponen Pendapatan Daerah ada empat yaitu: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintah, dari besar kecilnya Pendapatan Daerah dibandingkan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain, baik bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun pinjaman ekstem. Rasio kemandirian akan menunjukkan semakin tinggi rasio kemandirian yang dicapai maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak lain akan semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) adalah perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan Pemerintahan Daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Dian Ofsari (2018) dan Ali Sartono (2018) menunjukkan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah berdasarkan konsep *value for money* memenuhi standar rasio ekonomis dan rasio efektifitas. Penelitian oleh Fitriyani (2017) memenuhi ketiga rasio perhitungan pada metode *Value for money*.

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Daun Lamba (2020) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Value for money berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Keuangan Daerah Dengan Pendekatan *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang**".

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ialah meneliti tentang keuangan daerah dengan pendekatan *value for money* pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang periode 2016-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengukuran kinerja keuangan daerah oleh pemerintah dengan pendekatan *Value For Money* pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengukuran kinerja keuangan daerah oleh pemerintah dengan pendekatan *Value For Money* pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis meharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

- a) Bagi Universitas PGRI Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan yang menjadi acuan atau kajian bagi peneliti-peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.

b) Bagi Objek Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah dalam mengelola pengukuran kinerja keuangan daerah dengan pendekatan *Value For Money* khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.